

Pemolisian di Era Globalisme: Analisis Faktor Perubahan Lingkungan Ekonomi dan Perkembangan Terorisme

Ahrie Sonta

Program Doktor Pascasarjana
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
E-mail: ahrie2002@gmail.com

Abstract

Policing is one of the final filter mechanisms in order to avoid the impact of globalization entering Indonesia. Good policing can anticipate the dynamic of strategic environment before the bad impact happens in the society. Therefore, it is important for police to be able to conduct analyses on comprehensive strategic policing based on sectorial. For example, globalization, economy, and terrorism have specific chains and/or relationship patterns, in which the development influences the livelihood of Indonesia society. Indonesia Police has a role to protect, assist, and serve society by giving priority on preventive functions before negative impact caused by the changes of strategic environment occurred. National strategic analysis is important to develop police capability by using a humanity approach. This essay is to strategically analyze the comprehensive security through an economic point of view including in the context of terrorism.

Keywords: Policing; Economy; Terrorism

Abstrak

Pemolisian merupakan filter terakhir untuk mencegah dampak globalisasi yang masuk ke Indonesia. Pemolisian yang baik dapat mengantisipasi dinamika lingkungan strategis sebelum dampak yang buruk dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk melakukan analisis strategis pemolisian yang komprehensif berdasarkan sektoral. Sebagai contoh, globalisme, ekonomi, dan terorisme memiliki suatu rangkaian khusus dan/atau pola hubungan, di mana perkembangannya mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bertugas mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan sebelum dampak negatif dari perubahan lingkungan strategis tersebut terjadi di masyarakat. Analisis strategis keamanan nasional penting dalam pengembangan kapabilitas kepolisian dengan mengimplementasikan pendekatan yang humanis. Tulisan ini menganalisis secara strategis

keamanan komprehensif dilihat dari sektoral ekonomi, termasuk dalam konteks terorisme.

Kata Kunci: Pemolisian; Ekonomi; Terorisme

Pendahuluan

Untuk mengawali tulisan ini, ada baiknya disampaikan terlebih dahulu tentang apa itu pemolisian dan globalisasi. Pemolisian atau *policing* dalam “Merriam Webster Dictionary” dimaknai “*To regulate, control, or keep in order with or as if with a law enforcement agency.*” Sebenarnya, sejauh ini belum ada terjemahan yang tepat (pasti) terhadap kata *policing*, namun kata “pemolisian” termasuk yang banyak dipakai untuk mengalihbahasakan kata tersebut.

Globalisasi merupakan proses interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara, sebuah proses yang didorong oleh perdagangan dan investasi internasional dan dibantu oleh teknologi informasi.¹ Proses ini berdampak pada lingkungan, budaya, sistem politik, pembangunan ekonomi dan kemakmuran, dan kesejahteraan fisik manusia di masyarakat di seluruh dunia. Dengan demikian, globalisasi membawa dampak langsung maupun tidak langsung terhadap aspek keamanan dan pertahanan suatu negara.

Kalau kita menengok ke belakang, globalisasi pada dasarnya bukanlah hal baru. Selama ribuan tahun yang lalu, orang --dan kemudian juga perusahaan-- telah bertransaksi jual-beli dengan melakukan relasi jarak yang jauh, seperti melalui “Jalan Sutra” yang terkenal di Asia Tengah, yang menghubungkan Cina dan Eropa selama Abad Pertengahan. Para pengusaha di wilayah Nusantara juga terlibat transaksi perdagangan dengan China, negara-negara Arab dan Eropa (yang kemudian Belanda menganeksasi wilayah Nusantara). Selama berabad-abad, orang dan perusahaan telah menanamkan modalnya di perusahaan-persuahaan yang beroperasi di negara lain. Sebenarnya kalau kita mencermatinta, banyak fitur dari gelombang globalisasi saat ini, serupa dengan yang terjadi/berlaku sebelum pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914.

Namun harus diakui, perkembangan kebijakan dan teknologi dalam beberapa dekade terakhir ini, telah mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan migrasi lintas batas yang begitu besar sehingga banyak ahli

¹ Martin Wolf, *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007)

yang percaya bahwa dunia telah memasuki fase baru yang kualitatif dalam pembangunan ekonominya. Sejak tahun 1950, misalnya, volume perdagangan dunia telah meningkat 20 kali, dan dari arus masuk investasi luar negeri tahun 1997 sampai 1999 hampir dua kali lipat, dari \$ 468 miliar menjadi \$ 827 miliar. Untuk membedakan gelombang globalisasi saat ini dari yang sebelumnya, Thomas Friedman mengatakan, bahwa globalisasi saat ini “lebih jauh, lebih cepat, lebih murah, dan lebih dalam.”

Gelombang globalisasi saat ini didorong oleh kebijakan yang telah membuka ekonomi domestik dan global. Pada tahun-tahun sejak Perang Dunia Kedua, dan terutama selama dua dekade terakhir ini, banyak pemerintah di berbagai belahan dunia, mengadopsi sistem ekonomi pasar bebas, yang sangat meningkatkan potensi produktif mereka sendiri dan menciptakan banyak peluang baru untuk perdagangan dan investasi internasional.

Selain itu pemerintah juga telah merundingkan pengurangan secara dramatis terhadap adanya hambatan perdagangan. Semenjak perjanjian “Putaran Uruguay, sejumlah negara juga telah menetapkan kesepakatan internasional untuk mempromosikan perdagangan barang, jasa, dan investasi. Dengan memanfaatkan peluang baru di pasar luar negeri, perusahaan telah membangun pabrik-pabrik asing dan membuat pengaturan produksi dan pemasaran dengan mitra asing. Oleh karena itu, ciri globalisasi yang menentukan adalah struktur bisnis industri dan keuangan internasional. Globalisasi secara ekomi mungkin sangat menguntungkan, tetapi pada aspek lain juga menghadirkan sejumlah konsekuensi yang harus dipikul negara, pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam konteks globalisasi pula, kita harus menyadari bahwa perkembangan ancaman negara yang berasal dari *non-state actor* telah menciptakan peningkatan jumlah dan bentuk kejahatan di masyarakat. Jumlah tindak pidana pada tahun 2000 sebanyak 172.532 kasus dan pada tahun 2014 melonjak menjadi 325.317 kasus.² Konteks ini secara empirik menggeser paradigma keamanan nasional normatif menjadi bersifat aktif.³ Oleh karena itu, fungsi penangkalan ancaman *non-state actor* menggunakan institusi militer menjadi tidak relevan. Meskipun demikian, militer tetap melakukan analisis lingkungan strategis, hanya saja tidak dapat melakukan direktif penanganan. Ancaman *non-state actor*

² Data BPS (2016) Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2000–2014.

³ Istilah keamanan normatif merujuk pada definisi Frederick Hartman sebagai *the sum total of the vital national interest of the state*, yang berarti sesuatu yang membuat negara siap dalam menghadapi perang.

dapat berasal dari individu maupun organisasi, atau dapat juga organisasi tersebut merupakan proksi dari suatu *national interest* tertentu.⁴

Penangkalan ancaman negara dalam konteks damai ini menjadi suatu definisi turunan sebagai penangkalan kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Penegakan hukum menjadi dasar dari keamanan nasional aktif, yang dengan begitu menjadi suatu implementasi dari Pasal 28D UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Meski demikian dalam pendekatan penegakan hukum, penindakan hukum tetap menjadi upaya terakhir dalam menciptakan perlindungan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara dalam fungsi ini dituntut memiliki suatu strategi keamanan komprehensif atau *comprehensive strategic security* sebagaimana militer memiliki *strategic defense review* (SDR) yang secara berkala disusun guna menghadapi dinamika ancaman negara.⁵

Polri sendiri telah merilis data risiko penduduk terkena tindak pidana (per 100.000 penduduk) mengalami peningkatan dari sebesar 84 poin pada tahun 2000 menjadi 131 poin pada tahun 2014. Strategi keamanan komprehensif seyogyanya merupakan suatu dokumen Polri yang menunjukkan responsibilitas kepolisian terhadap potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Strategi keamanan merupakan suatu analisis keamanan terhadap sektoral lainnya mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi yang dapat berpengaruh terhadap keamanan nasional. Termasuk di dalam sektoral tersebut adalah suatu kondisi yang lahir dari suatu kebijakan pemerintah yang tidak dapat dipungkiri dapat menghasilkan residu kebijakan.

Pada institusi militer, pengembangan kajian ancaman dengan basis sektoral dilakukan dengan dasar analisis dokumen Sistem Pertahanan Negara sebagai dasar analisis lingkungan strategis, Buku Putih Pertahanan sebagai pedoman jangka panjang TNI, dan dokumen peningkatan kapabilitas melalui program *minimum essential forces* (MEF). Melalui dasar-dasar dokumen organisasi tersebut, TNI dapat melakukan penyesuaian pengerahan sumber daya ketika Pemerintah melaksanakan suatu

⁴ Lihat misalnya kasus orang China (disinyalir tentara China) dengan klaim pegawai kereta cepat MRT Jakarta PT KCIC yang melakukan aktifitas pengeboran dan pengetesan tanah di wilayah Halim Perdana Kusuma. <http://news.liputan6.com/read/2493769/pt-kereta-cepat-5-wn-china-ditangkap-di-halim-bukan-tentara> diakses pada 28 April 2016.

⁵ Di Inggris dokumen serupa dinamakan Strategic Policing Requirement (SPR). Dapat diunduh melalui www.gov.uk.

kebijakan, misalnya, ketika Pemerintah melakukan pengembangan sektor maritim, maka fungsi Angkatan Laut (AL) ditingkatkan melalui operasi kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan Dirjen Hubungan Laut, dan Bea Cukai. Terlepas dari publikasi capaian, tetapi berbagai dokumen tersebut menjadi acuan dan arahan pengembangan organisasi.⁶

Pada tahun 2016 Indonesia menduduki peringkat 51 dari 117 negara berdasarkan indeks kejahatan dengan indeks kejahatan 46,97 sedangkan indeks keamanannya di level 53.03. Merujuk pada rilis yang disampaikan Polda Metro Jaya, *crime index* atau indeks kejahatan sepanjang 2016 menggambarkan, total kejahatan pada tahun 2016 meningkat sekitar tiga persen dari 44.304 pada 2015 menjadi 43.149. Ada 11 kategori kejahatan yang banyak dilakukan, meliputi: pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, narkoba, perjudian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak, penyelundupan, dan korupsi. Sebagai gambaran, pada 2016 kasus pencurian dengan pemberatan (*curat*) sebanyak 3.187 kasus, pencurian dengan kekerasan (*curas*) sebanyak 719 kasus, penganiayaan berat (*anirat*) sebanyak 1.153 kasus, pembunuhan 71 kasus.

Dengan melihat fakta-fakta seperti itu, maka penting sekali adanya dokumen strategi keamanan nasional bagi pengembangan analisis keamanan yang dapat memberikan rasa aman pada masyarakat, sehingga secara berkala dapat dilakukan tinjauan kondisi lingkungan keamanan dan dokumen tersebut menjadi dasar dari pengembangan analisis pemolisian. Penanganan kepolisian merupakan layer pertama dalam keamanan nasional sebelum munculnya eskalasi ancaman negara. Strategi keamanan komprehensif sangat penting dalam kepastian

⁶ Sebagai contoh yang lain, pada November 2015 Rusia membuat rancangan pertahanan 2016-2020 dalam menyikapi perubahan dinamika global. Rancangan tersebut dibuat terintegrasi bersama 49 kementerian dan departemen. Rancangan sistem pertahanan merupakan dokumen yang berisi pedoman atau panduan yang menunjukkan arah dan lingkup aktivitas negara di bidang pertahanan sekaligus memberikan tugas yang sesuai untuk berbagai kementerian dan departemen. Rancangan pertahanan Rusia di antaranya mengurangi belanja pertahanan untuk tahun anggaran 2016 hingga lima persen. Pada tahun fiskal 2017 Rusia malah memotong sebesar 25,5%, turun dari RUB 3,8 triliun menjadi RUB 2,8 triliun atau dari USD 65,8 miliar menjadi USD 48,5 miliar. Keputusan tersebut menunjukkan, bahwa angkatan bersenjata pun tidak kebal akan perlambatan ekonomi yang terjadi di Rusia, yang terpukul akibat rontoknya harga minyak dan sanksi dari negara-negara Barat. (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160308071728-134-115980/anggaran-pertahanan-rusia-akan-dipotong-5-persen-di-2016/>, dan <https://jakartagreater.com/anggaran-militer-rusia-48-miliar/>)

operasional kepolisian menjalankan fungsi keamanan nasional.⁷ Peran pentingnya strategi keamanan merupakan suatu dukungan terhadap penyelenggaraan keamanan nasional secara berkelanjutan. Tulisan ini menganalisis ancaman kejahatan yang berpotensi muncul melalui salah satu sektor, yakni ekonomi.

Kepolisian dalam Dinamika Ekonomi Global dan Regional

Satu kejahatan yang terjadi adalah fenomena, tetapi seribu kejahatan merupakan statistik. Kalimat itu tepat untuk menggambarkan kepolisian dalam menyikapi kejahatan yang ditangani. Di balik kejahatan yang berulang terdapat latar belakang terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan yang berulang itu juga dapat menunjukkan suatu celah kejahatan dalam tatanan sistem. Lebih dalam dari penindakan dan pembuktian suatu kejahatan, pemolisian seyogyanya dapat melihat suatu bentuk kejahatan terhadap rangkaian sistem yang berlaku. Pemolisian yang melihat kedalam merupakan suatu sikap terhadap interdependensi antara hukum perorangan dengan kepentingan hukum masyarakat, bahkan dengan kepentingan hukum negara. Interdependensi inilah yang menjadi landasan dalam penerapan instrumen-instrumen hak asasi manusia dalam pemolisian. Dengan demikian, pemolisian dapat berlaku optimal tanpa harus mengedepankan kekerasan dan penggunaan senjata api.⁸

Jumlah tindak pidana di Indonesia mengalami lonjakan selama kurun 2007 hingga 2011. Jika pada tahun 2006 jumlah tindak pidana sebanyak 229.163 kasus pada tahun 2007 menjadi 330.384 kasus atau tumbuh 10 persen. Kenaikan tersebut terus terjadi hingga pada 2011 jumlahnya menjadi 347.605 kasus, dan merupakan jumlah kejahatan terbesar sepanjang masa reformasi. Kurun waktu tersebut berkorelasi dengan krisis keuangan dunia yang melanda negara-negara Eropa dan juga Amerika Serikat (AS). Konteks keterkaitan dengan Indonesia secara sektoral terlihat dari berubahnya berbagai indikator ekonomi domestik. Konteks keterkaitan dengan peningkatan kejahatan dapat ditafsir melalui pandangan Kenichi Ohmae, yang melihat bahwa globalisasi dalam

⁷ Operasional kepolisian dalam situasi tertentu memiliki acuan tertentu, lihat kajian yang pernah dilakukan RAND mengenai US Stability Police Force (2009) yang mengentengahkan polisi dengan status militer dalam operasi stabilitas. Ketentuan khusus seperti ini pernah dilakukan di Italia melalui Carabinieri, Perancis dengan French Gendarmerie, dan di Spanyol dengan Spanish Guardia Civil. Indonesia sudah sangat lama mengenal fungsi polisi dengan status militer ketika masa Dwi Fungsi ABRI.

⁸ Koesparmono Irsan "Polisi, Kekerasan, dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi" *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1. No.2 (2015), 302.

bidang ekonomi melunturkan batas-batas teritori suatu negara dan bersifat mondial. Artinya, ekonomi adalah faktor penentu dari masifnya perubahan sosial di masyarakat akibat globalisasi itu sendiri.⁹

Rantai ekonomi dalam tatanan global menurut Ohmae dimulai dengan berakhirnya perang dingin yang menciptakan suatu iklim investasi yang baik diantara berbagai negara. Dengan bantuan teknologi, aliran keuangan global semakin cepat, bahkan dalam beberapa hal mampu menghilangkan kontrol negara atas proses transaksi yang sedang berlangsung. Turunan dari investasi secara tradisional mencakup investasi riil dan sektor keuangan, kemudian berkembang menjadi investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Internalisasi pembangunan ekonomi ke dalam pengembangan sosial masyarakat melahirkan kesadaran individu yang baru, yakni daya konsumsi barang dan jasa.¹⁰ *Trigger* kapital mendorong pengembangan berbagai industri yang simultan dengan hubungan tersebut adalah kebutuhan pembangunan industri yang lebih luas.

Berangkat dari korelasi ekonomi dan perubahan sosial masyarakat melalui pemikiran Ohmae, masuknya modal (*capital inflow*) ke Indonesia ketika terjadi krisis keuangan dunia 2008, Indonesia diuntungkan dengan kebijakan penciptaan uang baru di AS atau disebut *quantitative easing*, sehingga uang banyak mengalir ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika perekonomian AS dan negara-negara Eropa mulai membaik, kebijakan mulai berganti dengan pengetatan keuangan atau disebut *tapering off*. Pada waktu krisis keuangan dunia, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia. Ekonomi bergerak secara kondusif yang didorong oleh minat para investor asing atas *return* yang tinggi. Perbaikan ekonomi AS menciptakan *return* yang kompetitif dapat ditawarkan di dalam negeri AS. Selain faktor *return*, AS sebagai negara superpower mampu memberikan jaminan investasi yang lebih terpercaya. Hal ini, bukan hanya investor AS yang menarik kembali investasinya, melainkan juga para investor dari Eropa dan negara maju di kawasan Asia dan Amerika Latin. Dalam konteks ini, Indonesia perlu merespon dengan menentukan tingkat imbal hasil secara bersaing dengan patokan perbaikan ekonomi AS.¹¹

⁹ Kenichi Ohmae dalam *The End of The Nation* (1995) mengenai empat *i*, mencakup: investment, information technology, industry, dan individual consumer.

¹⁰ Keith Faulks dalam *Political Sociology: A Critical Introduction*, Political Sociology: A Critical Introduction. (Edinburg: Edinburg University Press, 1999), 56.

¹¹ Jajang Y. Habib (2014) dalam *Head Wind Ekonomi 2015*, *Majalah Warta Ekonomi* WE/21/ XXVI/2014.

Jika pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investor global yang memiliki kekuatan sebagai pasar, maka seharusnya Indonesia tetap menarik perhatian investor di tengah membaiknya ekonomi AS. Selama 10 tahun terakhir Indonesia dianggap sebagai kekuatan ekonomi dengan kenaikan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Kekuatan pasar ini juga yang menyelamatkan Indonesia dari penularan (*contagion effect*) krisis keuangan dunia pada 2008. Keyakinan ini paling tidak dibenarkan secara empiris dalam berbagai literatur ekonomi. Lihat misalnya tulisan Carlota V. Cortez dengan judul *The Flying Geese Pattern Of Economic Development In Asia And Its Socio-Cultural Foundations*, yang merujuk pada tulisan Rene Ofreneo dengan judul "*The Theory of the Flying Geese Pattern of Economic Development and its Interpretations*"; tulisan V.R. Panchamuki, "*Strengthening Complementarities and Intra-Regional Trade in Asia and the Pacific*"; dan tulisan Yung Chul Park, "*Globalization and Regional Integration in Pacific Asia*".

Pada berbagai tulisan tersebut ditegaskan bahwa model *flying geese* atau model aliran dana yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik merupakan fenomena *market driven*. Dapat dimengerti jika studi empiris yang dibuat di pertengahan era 90-an itu dikoreksi oleh adanya krisis 97/98 yang menumbangkan julukan Indonesia sebagai "Macan Asia".¹²

Masalah fundamental ekonomi seperti: infrastruktur, logistik, pembebasan lahan, ketersediaan listrik, dan ketahanan pangan, masih menjadi pekerjaan rumah hingga beberapa tahun pasca Reformasi 1998, yang harus diantaskan pemerintah. Di pihak lain pemerintah juga mengalami "tekanan" dari permainan di pasar uang (*hot money*) yang menekan nilai tukar rupiah. Sebagai review singkat, pada awal tahun 2013, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS per dolarnya senilai Rp 9.670, namun dalam perjalanannya pada tahun 2015 sempat menembus di kisaran Rp 14.800/dolar. Pergantian rejim juga melahirkan dampak pada opini instabilitas ekonomi bagi pelaku pasar. Untuk menjawab pelambatan ekonomi, yang timbul baik faktor internal maupun global, pemerintah Indonesia kemudian membuat berbagai paket kebijakan ekonomi yang merupakan stimulus untuk menggairahkan kondisi pasar. Secara sederhana, paket kebijakan diibaratkan kran-kran air. Jika suatu instrumen ekonomi memerlukan stimulus pergerakan dan pertumbuhan,

¹² Anthony Reid. *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*. Singapore. Institute of Southeast Asian Studies. 2012; Lihat juga tulisan opini Ajeya Bandyopadhyay, "Indonesia' The Asian Tiger at Crossroad," *The Jakarta Post*, 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/10/indonesia-the-asian-tiger-crossroad.html>.

maka kran stimulus tersebut dibuka. Jika suatu instrumen ekonomi perlu penekanan maka kran tersebut ditutup sedikit-sedikit.

Dalam rangkaian dinamika sektor ekonomi tantangan pemolisian semakin besar. Beberapa fakta aktual menunjukkan bahwa terdapat 6.000 orang Indonesia memiliki rekening di luar negeri dengan potensi jumlah uang ditaksir mencapai Rp 11.400 triliun.¹³ Dana sebesar itu dilacak Kementerian Keuangan merupakan uang yang mengendap sepanjang kurun waktu 20 tahun terakhir (1995-2015). Jika ditelisik lebih dalam, temuan ini merupakan upaya masyarakat Indonesia dalam menghindari pajak. Lebih khusus, temuan kasus ini merupakan pengembangan dari temuan skandal Panama Papers dan Offshore Leak.

Pelarian uang dari Indonesia ke luar negeri sebenarnya sudah terjadi sejak krisis Indonesia 97/98. Kasus yang mencolok adalah ketika pemerintah memberikan bantuan likuiditas melalui Bank Indonesia (BLBI) untuk membantu (*bail out*) bank yang gagal dalam operasionalnya. Kebijakan pemerintah ini diperuntukkan bagi masyarakat atau nasabah bank yang uangnya tidak bisa kembali karena bank dinyatakan pailit. Namun, beberapa dari penerima BLBI melakukan tindak penyelewengan. Daftar pelaku pidana BLBI telah lama menjadi buronan, namun baru berhasil ditangkap pada medio April 2016 dengan ditangkapnya Samadikun Hartono di RRT. Pelaku menghilang saat hendak dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003. Dia adalah terpidana 4 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan dana BLBI senilai Rp 169 miliar.¹⁴

Penghindaran kewajiban masyarakat terhadap negara merupakan tugas kepolisian yang sangat penting untuk ditingkatkan. Selain itu, penanganan atas kejahatan trans nasional (Trans National Crime-TNC) seperti *illegal fishing*, *human trafficking*, hingga terorisme juga menjadi perhatian serius yang hingga saat ini masih bermunculan di tanah air. Jika melihat tren munculnya kejahatan tersebut, beriringan dengan kondisi sulit atau mendekati krisis. Diluar gencarnya *illegal fishing* yang ditangani Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam temuan di wilayah perairan Manado, pencurian ikan banyak dilakukan nelayan Filipina di wilayah Indonesia Timur. Namun, di Bitung Sulawesi Tenggara diberikan izin pendirian pabrik pengalengan ikan, bahkan diberikan status Kawasan

¹³ <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/756522-potensi-dana-wni-di-luar-negeri-bisa-lebih-dari-rp11-400-t> diakses pada 28 April 2016.

¹⁴ <http://news.detik.com/berita/3189355/jaksa-agung-samadikun-hartono-ditangkap-di-china-oleh-tim-terpadu> diakses pada 28 April 2016.

Ekonomi Khusus (KEK), sehingga *illegal fishing* tersebut secara tidak langsung menjadi legal.

Tahun 2015 merupakan babak baru bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk semakin memperdalam interkoneksi global. Hal ini berarti terdapat penempatan *global supply chain* dalam mendasari kebutuhan produksi, yang menggantikan mekanisme pemenuhan secara domestik. Keunggulan sebuah perusahaan di suatu negara akan semakin teruji apabila mampu memperoleh sumber bahan baku dengan harga yang relatif lebih murah dari berbagai sumber yang bisa diperoleh di pasar domestik. *Global supply chain* sebenarnya merupakan bagian mekanisme natural dalam ekonomi pasar yang mengalami perluasan dari konteks domestik ke tingkat global. Bentuk ini terjadi apabila terpenuhi segala persyaratannya, meliputi yang paling utama adalah ketersediaan informasi di pasar. Ditambah, di dalam pola integrasi harus menihilkan berbagai *barrier* dan insentif yang akan mereduksi mekanisme natural ekonomi. Informasi merupakan syarat yang paling utama, meliputi: kedudukan perusahaan; standar kualifikasi produksi; tingkat harga; hingga proses distribusi. Hal ini merupakan tantangan bagi perekonomian untuk menciptakan sistem yang dapat mengakomodir informasi tersedia di pasar. Selain itu, perekonomian harus mampu menstimulus para pelaku bisnis untuk saling bertukar informasi.

Dalam era digital, arus informasi didistribusikan melalui internet yang terkoneksi selama 24 jam. Pemolisian dapat dilakukan dengan pemantauan para pengguna informasi tersebut. Permasalahan konflik sosial dan unjuk rasa yang setiap saat dapat muncul juga merupakan permasalahan laten dalam ketertiban masyarakat. Tentu masih tersimpan dalam ingatan masyarakat, ketika salah satu aksi buruh berhasil memblokir KM 22 hingga KM 32 tol Jakarta Cikampek. Aksi serupa juga terjadi di Bogor dan Tangerang juga berhasil melakukan efek yang sama. Dampaknya, kegiatan ekonomi terhambat yang menyebabkan kerugian bernilai triliunan rupiah. Sektor makanan-minuman (*food and beverages*) dalam satu hari saja dapat mengalami rugi hingga Rp 2 triliun, akibat satu hari blokade jalan dikarenakan aksi buruh.¹⁵

Dari sepuluh isu aksi buruh, masalah utama yang diajukan buruh mengenai kelayakan upah. Setelah itu, mengenai kesejahteraan dan kemampuan daya beli (sembako). Indonesia sebagai negara dengan sistem perekonomian kesejahteraan (*welfare state*), kondisi ini biasanya menjadi momok bagi kelancaran aktivitas ekonomi. Aksi demonstrasi buruh

¹⁵ Jajang Y. Habib (2012) dalam Mereka Yang Ngiler Kenaikan UMR Jakarta WE-24/XXIV/2012

ini bahkan menjadi *the most popular issue* yang menghiasi media massa sepanjang tahun 2014. Mekanisme politik dan konsolidasi di tingkatan pelaku bisnis masih sangat rendah untuk merespon permasalahan seperti ini, dari 1.256 pemberitaan tentang buruh, dalam review Indonesia *Media Monitoring Center* tercatat hanya 2,8% saja pemberitaan yang berisi respon DPR atau DPRD terhadap aksi buruh tersebut. Pengalaman ini menunjukkan bahwa demonstrasi tidak lagi bisa dikatakan sebagai alat untuk merepresentasikan suara rakyat. Rutinitas demonstrasi bahkan sudah menjadi hal yang dihindari masyarakat. Tidak lain karena, efek dari demonstrasi seringkali mengganggu kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan perburuhan yang terjadi dalam hubungan industrial selama ini terjadi karena buruh berstatus *outsourcer*, yang secara UU belum diatur secara jelas. Di sisi yang lain, elastisitas penciptaan lapangan kerja untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan dibandingkan besaran yang sama pada periode 1980an dan 1990an. Dalam konteks pemolisian, demonstrasi permasalahan rendahnya respon politik dan konsolidasi pelaku bisnis menjadi masalah yang akan menciptakan situasi tuntutan masyarakat menjadi lebih lama. Terganggunya ketertiban masyarakat akan menjadi korban manakala kepolisian tidak dapat menindak dan mengamankan situasi di lapangan. Kepastian hukum mengenai penertiban masyarakat oleh kepolisian seperti ini juga masih menjadi masalah yang melingkupi tugas-tugas polisi di lapangan.

Ketidakpuasan masyarakat atas sistem yang berlaku dalam skala ekstrim dapat menciptakan kekerasan, bahkan dapat menggunakan senjata api dan bahan peledak. Instabilitas dalam perekonomian dapat menciptakan kerusuhan massa seperti terjadi pada awal masa reformasi, dimana daya beli masyarakat yang rendah melahirkan tindakan anarkis dengan menyerbu toko dan kawasan perdagangan yang ada. Berbagai isu suku, ras, dan agama juga menjadi faktor pemicu. Sehingga pada waktu itu, toko-toko milik non-pribumi dan yang beragama non-mayoritas menjadi sasaran massa. Dalam era saat ini, ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem telah melahirkan tindakan radikal dan kerusuhan amuk massa, tercatat sebagian tindakan itu menggunakan senjata dan bahan peledak (bom molotov). Dengan model pengembangan isu SARA, lahirlah kelompok-kelompok militan atas dasar agama dan dalam pemolisian kontemporer hal ini dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

Terorisme - Radikalisme - Ekstrimisme

Terorisme telah menjadi fenomena menarik dalam instabilitas keamanan dunia. Tindakan teror, bagi kelompok radikal, dianggap sebagai aksi kongkrit sebuah *isme* atas ketidakpuasan terhadap *status quo*. Pengaruh terorisme tidak berbeda dengan *isme* komunis yang berusaha melancarkan perubahan tata dunia secara revolusioner di bawah kekuatan internasionalisme. Seperti halnya itu, sulit untuk tidak ditemukan suatu teror yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan kejadian teror yang terjadi di negara lain. Seperti, teror bom dan senjata api pada 14 Januari 2015 di Pos Polisi perempatan Sarinah jalan M.H Thamrin Jakarta Pusat, yang berlangsung dalam kurun waktu berselang dua bulan dari serangan bom di kota Paris Perancis.

Rangkaian teror di Tanah Air berkorelasi dengan teror di belahan bumi lainnya juga dapat dikaji dari catatan sejarah teror bom dalam kurun dua dekade terakhir. Teror pada 11 September 2001 di New York (AS) atau lebih dikenal sebagai teror 9/11, telah menjadi viral bagi kelompok radikal di Indonesia. Setelah kejadian itu, di Indonesia terjadi teror pada tahun baru di rumah makan ayam Bulungan Jakarta, bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang, dan teror bom di restoran McDonald's Makassar pada 5 Desember 2002. Kejadian teror yang memakan korban sangat banyak juga terjadi pada tahun-tahun setelahnya, mencakup kejadian teror bom di J.W. Marriot pada 5 Agustus 2003, teror bom di Palopo, dan serangan terhadap Kedutaan Besar Australia. Pasca peristiwa bom Bali pada tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah untuk menanggulangi ancaman terorisme. Polri kemudian membentuk satuan khusus anti teror yang kemudian diberi nama Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT). Penanganan terorisme sepanjang dua dekade terakhir dilakukan Polri dengan sangat baik. Bukan hanya penanganan, tetapi juga tindakan yang bersifat pencegahan terhadap kantung-kantung kelompok radikal. Hasil dari operasi anti teror Polri melumpuhkan berbagai kantung teroris, yang sebelum tahun 2010 dimotori oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Penanganan anti teror yang dilakukan Densus 88, telah melemahkan kelompok radikal JI. Hal ini ditandai dengan tertangkapnya para pimpinan JI, dan beberapa tewas di tempat penyergapan yang dilakukan Densus 88 AT. Para pentolan teror itu mencakup Dr. Azhari Husin (perakit bom Bali 1, bom hotel JW Marriot/2003, dan bom Kedubes Australia) yang tewas 9 November 2009 dalam penyerbuan Densus 88 di kota Batu, Jawa Timur atau satu bulan setelah kejadian bom Bali 2. Noordin M. Top (perakit bom

Kedubes Australia, bom hotel JW Marriot dan hotel Ritz Carlton/2009) yang tewas pada 17 September 2009 dalam penyerbuan Densus 88 di kota Solo. Dulmatin (perakit bom Bali 1 dan bom Bali 2) yang tewas dalam penyerbuan Densus 88 di Pamulang Tangerang Selatan pada 9 Maret 2010. Sementara itu para pelaku teror bom Bali 1 yang merupakan pengikut utama JI mencakup Imam Samudera, Mukhlas, dan Amrozi telah dieksekusi mati pada medio 2008. Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan tokoh spritual JI dan pendiri Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) telah dipenjarakan sejak Agustus 2010 hingga tulisan ini dibuat. Pengikut JI yang dekat dengan Dulmatin, yakni Umar Patek, juga telah ditangkap oleh Kepolisian pada Agustus 2011.¹⁶

Penanganan anti teror yang dilakukan Polri dalam satu dekade tersebut, telah menghancurkan kekuatan kelompok teror di Indonesia. Setelah tahun 2009, kelompok-kelompok radikal betul-betul tefragmentasi atau terpecah belah. Meskipun sekarang ini, ada banyak sel radikal yang cukup berbahaya dari dilihat sisi ideologi, tetapi dari kapasitas melakukan aksi terorisme masih lemah. Sejak tahun 2009 sampai sekarang ini misalnya saja, tidak ada satu bom yang meledak seperti semestinya setelah tewasnya Noordin M. Top.¹⁷ Dalam kurun waktu setelah kematian pemimpin JI, aksi kelompok radikal yang mengatasnamakan jihad eskalasinya semakin menurun.¹⁸

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, serangan kelompok radikal mengalami perubahan pola teror. Kelompok-kelompok radikal tersebut kini memiliki kecenderungan penyerangan dengan sasaran ditujukan terhadap aparat kepolisian. Dimulai dari serangan terhadap Mapolres Hamparan Perak Sumatera Utara pada 22 September 2010, yang teridentifikasi jaringan Noordin M. Top. Bom Buku dilancarkan oleh Pepi Fernando pada medio Maret 2011 dengan beberapa target sasaran, dan sempat meledak di Utan Kayu. Serangan bom Cirebon pada 15 April 2011 yang teridentifikasi dilakukan oleh kelompok Tauhid wal Jihad. Penyerangan terhadap polisi terjadi di Solo pada dua minggu terakhir Agustus 2012. Pada bulan September 2012 penyerangan terhadap polisi juga terjadi di Tambora dan Depok. Bom bunuh diri juga pernah terjadi

¹⁶ Tempo.co, *Umar Patek Tertangkap Bersama Istri*, <https://nasional.tempo.co/read/324186/umar-patek-tertangkap-bersama-istri>

¹⁷ Wawancara media Voice Of America (VOA) dengan Sydney Jones pada 7 Desember 2015 dikutip dari <http://www.voaindonesia.com/content/wawancara-voa-dengan-sidney-jones-seputar-isis-dan-ancaman-teror-di-indonesia/3092052.html> diakses pada Selasa 9 Februari 2016.

¹⁸ Gatra.com, *Sergap Lagi, Tembak Lagi*. <http://majalah.gatra.com/2010-05-17/majalah/artikel.php?pil=23&id=138064>

di Polres Poso yang teridentifikasi dilakukan oleh kelompok pimpinan Santoso.¹⁹

Aksi radikal dengan modus perampokan juga menjadi pola yang dilakukan sel-sel radikal yang telah lepas dari induknya. Beberapa kejadian yang sempat dilancarkan meliputi, perampokan CIMB Medan yang dilakukan oleh jaringan Noordin M. Top pada April 2010. Perampokan Bank BCA Palu yang dilakukan kelompok pimpinan Santoso yang bermarkas di Poso. Pada Maret 2013, terjadi perampokan toko emas Tambora yang teridentifikasi dilakukan kelompok Abu Umar. Dalam kurun waktu yang bersamaan, aksi teror bom juga sempat dilakukan kelompok radikal terhadap tempat ibadah gereja, meliputi: bom pipa gas, BPIS Solo, dan Gereja di Poso.²⁰

Penanganan teror oleh Kepolisian yang bersifat pencegahan dalam kurun waktu 2014 hingga 2015 juga mencatatkan keberhasilannya. Tindakan pencegahan itu meliputi pencegahan pengiriman dana ke kelompok teroris pimpinan Santoso dengan menangkap 2 pelaku. Penangkapan 12 orang jaringan ISIS pada tahun 2015. Kepolisian juga berhasil mencegah peledakan bom di Mall Alam Sutera dan pencegahan aksi teror di wilayah Tasikmalaya. Selain itu, ada juga operasi di Jawa Tengah; penangkapan 4 orang di Jawa Timur; dan pencegahan aksi teror di Bekasi dengan menangkap 1 orang. Dalam kurun waktu tersebut, Polri telah menangkap 74 orang terduga teroris. Sebanyak 65 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jika diriview sejak kemunculan tindak terorisme dalam rentang waktu 15 tahun terakhir, Kepolisian telah berhasil mengungkap 171 kasus terorisme.²¹

Review Dampak Paket Kebijakan Ekonomi

Globalisasi tidak mampu membatasi dampak positif diiringi masuknya unsur negatif. Terorisme merupakan salah satu unsur globalisme yang masuk melalui pemikiran dan menciptakan kelompok tertentu di masyarakat. Tetapi unsur negatif tersebut hanya bisa masuk jika Indonesia berada dalam ketidakstabilan. Pakar hubungan internasional Arab Saudi

¹⁹ Rappler, *Dendam jaringan teroris Santoso kepada Polisi*, <https://www.rappler.com/indonesia/119355-dendam-jaringan-teroris-santoso-kepada-polisi>

²⁰ Antara News, *Api teror terus menyala sepanjang 2013*, <http://www.antaranews.com/berita/411576/api-teror-terus-menyala-sepanjang-2013>.

²¹ Polri Klaim Gagalkan 9 Aksi Teror Setahun Terakhir. Dikutip dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/29/063731640/polri-klaim-gagalkan-9-aksi-teror-setahun-terakhir> diakses pada Selasa 9 Februari 2016.

Ali Saeed Awadh Asseri (2009), mengatakan bahwa terorisme, dalam hal ini Ji, mengambil keuntungan dari gejolak politik dan ekonomi Indonesia di akhir 1990-an untuk membangun sel-sel teror dan mempromosikan Islam radikal di seluruh Nusantara.²² Model-model penghimpunan modal oleh kelompok teroris kemudian menjadi marak setelah kegiatan Ji dapat ditekan oleh peningkatan keamanan nasional.

Fakta itu jelas menunjukkan bahwa kondisi politik dan ekonomi tidak dapat dianggap sebelah mata sebagai faktor lingkungan bagi berkembangnya gerakan radikal. Oleh karena itu, sebagai suatu prevensi keamanan nasional adalah penciptaan tatanan sistem politik dan ekonomi yang stabil mutlak harus dilakukan. Ekonomi masyarakat kecil yang dapat dengan mudah menjadi ruang berkembangnya pemikiran radikal, harus mendapat penataan prioritas pemerintah. Pada tataran politik, kepemimpinan nasional terus berupaya berjalan di alam demokrasi yang mengutamakan *good corporate governance*. Indikator tersebut ketika dikaitkan terhadap globalisme maka akan melahirkan nasionalisme yang lebih baik pada masyarakat. Faktor berkembangnya nasionalisme dalam hal ini muncul sebagai proses industrialisasi dan kondisi sosio struktural, politik, dan ekonomi yang menyertainya.²³ Sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, upaya penataan ekonomi masyarakat sendiri ditempuh melalui arahan Presiden yang dikenal dengan paket kebijakan ekonomi.

Paket kebijakan ekonomi mulai dirilis pemerintah sejak 9 September 2015, yang jika dilakukan review, maka keseluruhan kebijakan ekonomi bersifat pelonggaran. Artinya, arahan kebijakan yang bersifat reward, dalam hal ini istilah yang sering digunakan adalah insentif, pemangkasan, dan *right sizing* lingkungan yang mendukung instrumen ekonomi.²⁴ Paket kebijakan dalam nomenklatur tata pemerintahan bersifat arahan Presiden dan bukan instruksi Presiden yang memiliki kekuatan hukum melalui Instruksi Presiden (Inpres). Dengan demikian, paket kebijakan ini bersifat tidak mengikat. Namun, menjadi arahan bagi lembaga dan/atau kementerian yang menangani untuk menindaklanjuti dengan peraturan secara sektoral. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Presiden seringkali membuat Inpres yang langsung kebijakan sebagai salah satu

²² Ansyad Mbai, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. (Jakarta: AS Production Indonesia, 2013), 132.

²³ Muhammad A.S. Hikam *Deradikalisasi: Deradikalisasi: peran masyarakat sipil Indonesia membendung radikalisme* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), 50.

²⁴ Pada pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono dikenal kebijakan *pro poor, pro job, pro environment*.

produk perundangan dengan kekuatan hukum yang kuat. Berikut disajikan review paket kebijakan ekonomi sampai dengan XI.

Review Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) I s.d XI

PKE	Arahan Kebijakan Presiden	
	Pelonggaran	Pengetatan
I	Sektor Properti: perijinan, tata ruang, pengadaan barang dan jasa	-
II	Deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk investasi PMDN/PMA. Pemberian tax holiday dan allowance.	-
III	Easy policy untuk sektor migas, sektor agraria, dan sektor kredit usaha rakyat (KUR)	-
IV	Kebijakan upah murah dengan kenaikan proporsional dan penyaluran KUR untuk UMKM berorientasi ekspor.	-
V	Insentif pajak dalam revaluasi aset perusahaan BUMNswasta.	-
VI	Insentif untuk kawasan ekonomi khusus (KEK), pengelolaan sumber daya air, dan penyederhanaan izin impor bahan baku obat dan makanan oleh BPOM.	-
VII	Izin investasi yang tiga jam dan keringanan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 untuk karyawan yang bekerja di industri padat karya (<i>by demand</i>).	-
VIII	<i>One map policy</i> pembangunan kilang minyak.	-
IX	Pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa dan kota	-
X	Penghapusan 35 sektor bisnis pada Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk asing.	-
XI	Insentif kredit ekspor, pengurangan PPh perdagangan rupiah, penghapusan beberapa otoritas untuk mengurangi waktu bongkar-muat di pelabuhan, pembukaan investasi sektor darmaasi dan alat kesehatan, dan kantor POS dapat beroperasi menghimpun dana tabungan kepada masyarakat (fungsi bank pada kantor POS).	-

XII	Upaya yang dilakukan Pemerintah ini mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sambungan listrik, mendapatkan akses kredit, dan sebagainya	-
XIII	Pemerintah menyederhanakan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai izin dan rekomendasi untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan tahapan itu, maka waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari.	
XIV	Paket kebijakan ekonomi yang berupa peta jalan e-commerce. Visi pemerinyah adalah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020.	
XVI	Paket kebijakan ini berisikan tentang upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Kebijakan ini juga bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (<i>single submission</i>).	

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Upaya pemerintah dalam memberikan arahan kebijakan yang bersifat pelonggaran ini merupakan suatu kondisi semakin terbukanya perekonomian Indonesia terhadap ekonomi global. Salah satu ekonom dunia Ragnar Nurske, mengatakan bahwa negara berkembang akan selalu ada dalam lingkaran setan kemiskinan selama negara tersebut tidak membuka kran investasi untuk asing. Tetapi hal yang perlu menjadi catatan bahwa investasi asing tidak boleh menjadi bahan bakar dan pelaku utama dalam perekonomian Indonesia. Jika hal ini terjadi maka Indonesia akan menjadi negara periferi yang sangat tergantung pada negara maju.²⁵

Integrasi perekonomian terhadap negara-negara maju memiliki risiko yang sangat besar, alih-alih kerja sama terbangun negara berkembang justru seringkali tidak mampu mandiri dan membangun

²⁵ Ahmad Erani Yustika, Enny Sri Hartati, dkk, *Badai Krisis Ekonomi dan Jebakan Liberalisasi* (Jakarta: Indef, 2011), 20.

ekonomi yang kuat. Negara-negara maju cenderung membuat hegemoni untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengambil keuntungan dari negara berkembang.²⁶ Sejak 1990 hingga 2010 gejala ketergantungan sudah mulai terlihat. Jumlah investasi dalam negeri terhadap investasi asing terus mengalami ketimpangan. Disamping itu, investasi asing telah merambah berbagai sektor strategis dalam perekonomian, mencakup: telekomunikasi, transportasi, energi, dan sektor publik lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang Indonesia. Data 2011 menunjukkan kepemilikan asing pada sektor pertambangan mencapai 75 persen. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non-Pertamina, 120 dioperasikan asing, 28 dioperasikan perusahaan nasional, dan 77 blok dioperasikan gabungan asing dan nasional. Pada sektor perbankan kepemilikan asing telah mencapai 47,02 persen dari total aset sebesar Rp 3.065 triliun.

Pembukaan Daftar Negatif Investas (DNI) untuk asing melalui paket kebijakan ekonomi merupakan pendalaman (*deepening*) investasi asing di Indonesia. Dalam keterkaitan itu, pemolisian harus mampu melihat, mengidentifikasi, analisis dampak, dan mengambil langkah antisipasi melalui pemolisian. potensi konflik kepentingan lokal dan asing kedepannya diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hampir dapat dipastikan bahwa kelompok kepentingan ini datang dengan antisipasi manajemen konflik di tataran masyarakat lokal. Pemolisian masyarakat (Polmas) juga menjadi hal yang prioritas untuk dapat mengidentifikasi gejala-gejala yang muncul dari pertentangan di masyarakat. Konsentrasi Polmas dapat dibina dan dilakukan pada daerah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, yang dalam paket kebijakan ekonomi merupakan lokus terkonsentrasi dari penempatan investasi asing.

Penutup

Pemolisian merupakan filter terakhir bagi globalisasi yang masuk ke Indonesia. Pemolisian yang baik dapat mengantisipasi dampak dari suatu lingkungan strategis sebelum dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk melakukan analisis strategis pemolisian yang komprehensif. Sebagai suatu contoh globalisme, ekonomi, dan terorisme memiliki suatu rangkaian khusus dan pola hubungan dalam hidup dan berkembangnya di Indonesia

²⁶ Lihat misalnya pendapat Ekonomi AS Andre Gunder Frank dan Paul Baran serta ekonomi Mesir Samir Amin.

Globalisasi memberi efek berantai kepada negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, dan terutama yang cepat menjaral dampaknya adalah pelambatan atau krisis ekonomi. Apabila pelambatan atau krisis tersebut tidak dapat segera diatasi, yang berujung pada menurunnya penyerapan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, pada akhirnya tumpahan persoalan sosial yang terjadi, seperti meningkatnya tindak kriminal, menjadi tanggung jawab polisi untuk menanganinya.

Untuk itu, Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan sebelum dampak negatif dari perubahan lingkungan strategis tersebut terjadi di masyarakat. Di sinilah pentingnya strategi yang tepat dalam penganggaran dan rekrutmen/pembinaan SDM di Polri, sehingga anggaran tidak tersedot besar di biaya rutin (pegawai). Dalam struktur penganggaran yang belum memungkinkan untuk menaikkan anggaran Polri ke level idel, maka kebijakan zero growth di SDM Polri menjadi jalan tengah, dengan diikuti oleh usaha untuk meningkatkan kualitas personel yang ada.

Perubahan kebijakan di tingkat nasional juga merupakan faktor utama yang harus dikawal dampaknya terhadap ketertiban masyarakat. Pro-kontra pendapat dan kepentingan di masyarakat selalu menciptakan perubahan ketertiban, yang jika tidak direspon oleh pemerintah maka akan menciptakan ketidakstabilan sosial. Pemolisian yang mengedepankan kekerasan tentu tidak lagi menjadi solusi untuk menahan perubahan sosial. Pendekatan humanis kepolisian penting kedepannya untuk menjadi jembatan yang baik bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sehingga, pemolisian juga dapat membantu masyarakat dalam mengikuti kebijakan pemerintah. Harmonisnya hubungan pemolisian, masyarakat dan kebijakan publik pemerintah akan menciptakan kenyamanan hidup bermasyarakat sebagai suatu bangsa.

Daftar Pustaka

- Ayoob, Mohammed. "Security in the Age of Globalization: Spearating Appearance from Reality." Dalam *Globalization, Security and the Nation State: Paradigm in Transition*, disunting oleh Ersel Aydinli dan James N. Rosenau. New York: State University of New York, 2005.

- Bandyopadhyay, Ajeya. "Indonesia' The Asian tiger at crossroad." *The Jakarta Post*. 10 Maret 2015. <http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/10/indonesia-the-asian-tiger-crossroad.html> (diakses Oktober 11, 2017).
- detiknews. *Jaksa Agung: Samadikun Hartono Ditangkap di China oleh Tim Terpadu*. 16 April 2016. <http://news.detik.com/berita/3189355/jaksa-agung-samadikun-hartono-ditangkap-di-china-oleh-tim-terpadu> (diakses April 28, 2016).
- Gazeta, Rossiyskaya. "Putin Tanda Tangani Rancangan Pertahanan Terbaru Rusia." *Russia Beyond*. 18 November 2015. https://id.rbth.com/politics/2015/11/18/putin-tanda-tangani-rancangan-pertahanan-terbaru-rusia_541833 (diakses April 22, 2016).
- Habib, Jajang Y. "Head Wind Ekonomi 2015." *Majalah Warta Ekonomi*, 2014.
- _____. "Mereka Yang Ngiler Kenaikan UMR Jakarta." *Majalah Warta Ekonomi*, 2012.
- Hikam, Muhammad A.S. *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Deradikalisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Irsan, Koesparmono. "Polisi, Kekerasan dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi." *Jurnal Keamanan Nasional* I, no. 2 (2015): 297-310.
- Jones, Sidney, wawancara oleh Andylala Waluyo. *Wawancara dengan Sidney Jones Seputar ISIS dan Ancaman Teror di Indonesia* VOA Indonesia, (7 Desember 2015).
- Liputan6. *PT Kereta Cepat: 5 WN China Ditangkap di Halim Bukan Tentara*. 27 April 2016. <http://news.liputan6.com/read/2493769/pt-kereta-cepat-5-wn-china-ditangkap-di-halim-bukan-tentara> (diakses April 28, 2016).
- Mbai, Ansyad. *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Jakarta: AS Production Indonesia, 2013.
- Ohmae, Kenichi. *The End of the Nation-State: the Rise of Regional Economies*. New York: Simon&Schuster, 1995.
- Reid, Anthony. *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012.
- Tempo.co. *Polri Klaim Gagalkan 9 Aksi Teror Setahun Terakhir*. 29 Desember 2015. <https://nasional.tempo.co/read/731640/polri-klaim-gagalkan-9-aksi-teror-setahun-terakhir> (diakses Februari 9, 2016).

VIVA.co.id. *Potensi Dana WNI di Luar Negeri Bisa Lebih dari Rp11.400 T. 5* April 2016. <http://www.viva.co.id/berita/bisnis/756522-potensi-dana-wni-di-luar-negeri-bisa-lebih-dari-rp11-400-t> (diakses April 28, 2016).

Yustika, Ahmad Erani, et al. *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2012: Badai Krisis Ekonomi dan Jebakan Liberalisasi*. Jakarta: Indef, 2011.

